

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Suatu daerah yang telah diberikan hak otonom harus mampu mengelola sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah identik dengan *good government* agar terwujudnya tata kelola yang baik maka pemerintahan harus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 17 tahun 2003 menjelaskan bahwa Presiden dan Gubernur /Bupati /Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan kepada DPRD.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi yang relevan terhadap posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Setiap tahunnya laporan keuangan daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dengan tujuan memberi opini atas kewajaran laporan

keuangan pemerintah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) mengeluarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah dan dikirim ke daerah masing-masing.

Adapun opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar(TW),dan Tidak Memberi Pendapat(TMP) atau pernyataan menolak memberi opini. Pada IHPS Semester II Tahun 2016 hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) terhadap pemerintah daerah terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu(PD TT). Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kerugian negara dalam pemeriksaan, dimana masih adanya kelemahan sistem pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) IHPS Semester II Tahun 2016 atas pemeriksaaan laporan keuangan pemerintah daerah ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian intern(SPI),dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang berada di Sumatera Barat dan juga kota yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK). Tercatat dalam IHPS II (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) tahun 2016 untuk Kota Payakumbuh yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011-2015**

Tahun	Opini BPK
2011	WDP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2012	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2013	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2014	WTP DPP (Wajar Dengan Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas)
2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

*Sumber: IHPS Semester II Tahun 2016*

Opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan(BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pemeriksaan tahun 2016 atas laporan keuangan tahun anggaran 2015, hal ini dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Meskipun opini yang diberikan Badan Pengawasan Keuangan(BPK) sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih memiliki permasalahan yang ditemukan yaitu masih rendahnya kualitas informasi laporan keuangan daerah yang disebabkan lemahnya sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.(*sumber:payakumbuhkota.go.id/opini-bpk/*)

Adapun kelemahan sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan antara lain(*sumber:BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat*):

- a. Pengelolaan kas pada beberapa bendahara pengeluaran belum tertib
- b. Penatausahaan dan proses penghapusan aset tetap pada beberapa SKPD belum tertib
- c. Pengelolaan beberapa retribusi daerah belum tertib

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh masih memiliki kekurangan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan berkualitas. Hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007, sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut penelitian Botutihe (2013), menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2014), menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Riau. Maka dapat disimpulkan bahwa jika semakin baik sistem akuntansi keuangan di suatu daerah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik pula.

Selain penerapan sistem akuntansi keuangan, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu : untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan

kegiatan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut penelitian Pribadi (2015), menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan dari penelitian Octarinda (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila semakin tinggi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil dari penelitian terdahulu masih ada yang mengatakan bahwa dan sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan juga hasil dari pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2016 terhadap Kota Payakumbuh. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan kembali penelitian terkait dengan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan objek penelitian Kota Payakumbuh. Pemilihan Kota Payakumbuh sebagai objek penelitian karena Kota Payakumbuh dinilai cukup berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh?
- b. Apakah penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh?
- c. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

- a. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Kota Payakumbuh berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
- b. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Kota Payakumbuh berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
- c. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Kota Payakumbuh secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman dan wawasan tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta bahan pertimbangan berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

d. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi kalangan akademik yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

## 1.5 Sistemika Penulisan

Penulis membagi sistemika penulisan skripsi ini kedalam lima bagian yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan, tinjauan penelitian terdahulu serta kerangka konseptual.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisikan tentang jenis penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel metode analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olahan data serta pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Berisikan simpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi penelitian mendatang.

